



Validasi Pemilih Pilpres

Dana Rp 409 Juta untuk RT Cair

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Jumat (15/5), mencairkan dana Rp 409 juta bagi RT serta Ketua RT dan RW se-Jogja, untuk keperluan validasi data pemilih Pemilu Presiden (Pilpres). Dana diambil oleh kelurahan, selanjutnya kelurahan mendistribusikannya ke wilayah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Purwanto di Balaikota Timoho, Jumat (15/5), mengatakan, pengucuran dana itu merupakan bagian dari bantuan Pemkot untuk penyelenggaraan Pilpres di Jogja.

Dana diambil dari pos dana tak terduga, mengingat fasilitasi penyelenggaraan Pilpres belum dianggarkan dalam APBD Kota Yogyakarta 2009.

Dijelaskan, setiap RT memperoleh dana fasilitasi Rp 100.000 untuk menyelenggarakan

pertemuan warga guna membahas Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres dan persoalan lain berkaitan dengan pendaftaran pemilih Pilpres.

Sedangkan ketua RT dan ketua RW masing-masing memperoleh Rp 50.000 sebagai insentif. Di Jogja terdapat sekitar 2.500 RT dan 600 RW. "Dana *segitu* kami kira cukup untuk pertemuan warga di tingkat RT, karena jumlah kepala keluarga di tiap RT rata-rata antara 30 KK sampai 50 KK. Nanti RT wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana," ujarnya.

Hasil validasi DPS pada 11-17 Mei ini akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akan menetapkan DPT Pilpres antara 18-24 Mei.

Sementara itu KPU Kota Yogyakarta akan menyiapkan TPS khusus di rumah sakit (RS).

Namun, tidak semua RS di Jogja bakal kebagian jatah TPS khusus. TPS khusus hanya akan didirikan empat rumah sakit besar yakni RS Bethesda, RS Panti Rapih, RS PKU Muhammadiyah dan RS Wirosaban.

"Ada kuota pemilih di tiap TPS, jadi *nggak* semua RS kita didirikan TPS khusus. TPS itu nantinya untuk melayani pemilih yang berada di rumah sakit dan sekitarnya, seperti pasien, keluarga pasien, serta staf rumah sakit yang pada 'hari H' Pilpres menjalankan tugas dan tidak bisa pulang ke tempat mereka tinggal," jelas Anggota KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto.

Selanjutnya KPU akan berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit, baik yang terdapat TPS khusus maupun tidak. Dalam koordinasi akan dijelaskan mekanisme Pilpres. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005